BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

PELATIHAN PENGUATAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEWANG DALAM PENGELOLAAN HUTAN SAGU DI NEGERI IHAMAHU

TRAINING ON STRENGTHENING THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE KEWANG IN SAGO FOREST MANAGEMENT IN NEGERI IHAMAHU

Marthina Tjoa[1*], Gun Mardiatmoko[2], Marcus Luhukay[3], Aryanto Boreel[4], Fredy Hendry Louhenapessy[5]

[1,4]Program Studi Pengelolaan Hutan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura.
[2]Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura.
[3]Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura.
[5]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura.
Jln. Ir. M. Putuhena. Kampus-Poka. Ambon, 97233. Indonesia
**E-mail Korespondensi: tjoatine@gmail.com*

ABSTRAK

Hutan sagu memiliki peran penting bagi ketahanan pangan dan sosial ekonomi masyarakat di Maluku, namun menghadapi ancaman degradasi dan konflik lahan. Kewang, sebagai lembaga adat penjaga sumber daya alam, memiliki keterbatasan kapasitas teknis dalam mengidentifikasi kerusakan ekologis secara dini serta memediasi konflik tenurial atau kepemilikan lahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas operasional Kewang di Negeri Ihamahu melalui Pelatihan Penguatan Peran dan Tanggung Jawab. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 27-28 Agustus 2026 dengan melibatkan 15 orang perwakilan anggota Kewang. Metode pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, permainan partisipatif, observasi lapangan, simulasi penyelesaian sengketa (roleplay), dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis peserta secara signifikan pada indikator peran dan tanggung jawab (dari 60% menjadi 95%), identifikasi kerusakan lingkungan (dari 55% menjadi 90%), keterampilan mediasi konflik (dari 45% menjadi 85%), serta prosedur pelaporan (dari 50% menjadi 90%). Kesimpulan dari kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas Kewang yang berhasil mengintegrasikan hukum adat lokal dengan metode pengawasan lingkungan modern, serta terbentuknya RTL patroli yang terstruktur guna menjaga kelestarian hutan sagu

Kata Kunci: Hutan Sagu, Kewang, Mediasi Konflik, Pengawasan Lingkungan

ABSTRACT

Sago forests play a vital role in the food security and socio-economic well-being of communities in Maluku; however, they face threats from degradation and land-related conflicts. The Kewang a traditional institution tasked with safeguarding natural resources often lacks the technical capacity to identify ecological damage at an early stage or to mediate disputes over land tenure and ownership. Consequently, this community service initiative aimed to enhance the operational capacity of the Kewang in Negeri Ihamahu through a training program focused on strengthening their roles and responsibilities. The program was conducted over two days, from August 27–28, 2026, and involved 15 representatives from the Kewang. The methodology included interactive lectures, participatory games, field observations, dispute-resolution simulations (role-playing), and the development of a Follow-Up Action Plan (RTL). The initiative was evaluated using pre-test and post-test instruments. The results demonstrated a significant improvement in the participants' understanding and technical skills across several key areas: roles and responsibilities (increasing from 60% to 95%), identification of environmental damage (from 55% to 90%), conflict mediation (from 45% to 85%), and reporting procedures (from 50% to 90%). In conclusion, the initiative successfully enhanced the capacity of the Kewang by integrating local customary law with modern environmental monitoring methods, and resulted in the creation of a structured patrol action plan to ensure the long-term preservation of the sago forests.

Keywords: *Sago Forest, Kewang, Conflict Mediation, Environmental Oversight*

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

PENDAHULUAN

Kewang merupakan lembaga adat yang memegang peran sentral dalam menjaga, mengawasi, dan melindungi sumber daya alam secara berkelanjutan di wilayah Negeri Ihamahu dan Negeri Tuhaha (Mongabay, 2021; Dayanto, 2024). Peran kelembagaan adat ini sangat krusial dalam melindungi ekosistem esensial, khususnya hutan sagu yang selama ini menjadi pilar utama ketahanan pangan serta jaring pengaman sosial ekonomi bagi masyarakat lokal (Ponisri et al, 2023). Namun pada tataran praktis, eksistensi lahan sagu di Maluku terus mengalami tekanan dan degradasi secara kuantitatif hingga diperkirakan mencapai penurunan luas area sebesar 15-20% dalam satu dekade terakhir akibat alih fungsi lahan serta kurangnya perawatan pascapanen (Luhukay et al, 2026).

Persoalan mendasar yang saat ini dihadapi oleh mitra sasaran, yakni para anggota Kewang di Negeri Ihamahu, adalah terbatasnya kapasitas teknis dalam mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan ekologis secara dini, serta minimnya keterampilan manajerial dalam menangani konflik tenurial atau kepemilikan lahan. Kondisi ini semakin mendesak untuk diselesaikan mengingat pemanfaatan lahan sagu saat ini sangat rentan memicu konflik kepentingan dan sengketa batas dati (tanah pusaka) antar warga (Sitania et al, 2020).

Sebagai upaya strategis untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh mitra tersebut, program pengabdian ini memfokuskan program kerjanya pada pelaksanaan Pelatihan Penguatan Peran dan Tanggung Jawab Kewang di Negeri Ihamahu. Program ini bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan sebuah intervensi lanjutan dari rangkaian kegiatan penanaman dan rehabilitasi lahan sagu seluas lebih dari 5 hektar yang telah sukses dilaksanakan sebelumnya di kedua negeri secara partisipatif oleh Walang Perempuan bekerjasama dengan Universitas Pattimura.

Langkah rehabilitasi tersebut terbukti menjadi pendorong utama bangkitnya keterlibatan masyarakat untuk secara aktif menjaga regenerasi sumber daya sagu yang mulai menipis. Namun, untuk menjamin keberlanjutan hasil penanaman dan pemulihan lahan tersebut dalam jangka panjang, fungsi operasional Kewang di garis depan mutlak memerlukan penguatan yang sistematis dan terstruktur (Tjoa et al, 2021). Oleh karena itu, materi pelatihan dirancang secara spesifik untuk membekali Kewang dengan kompetensi identifikasi kerusakan hutan sagu dan teknik resolusi sengketa lahan. Dengan demikian, kegiatan pelatihan ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari rangkaian upaya untuk memastikan keberlanjutan hasil kegiatan penanaman dan rehabilitasi sagu melalui penguatan peran dan tanggung jawab Kewang di Negeri Ihamahu.

Pendekatan penguatan kapasitas lembaga adat (Kewang) sebagai instrumen pelestarian lingkungan dan resolusi konflik memiliki tingkat kehandalan yang sangat tinggi dan relevan dengan sosiokultural masyarakat di Maluku (Selanno et al, 2026). Berbagai hasil penelitian empiris membuktikan bahwa integrasi perlindungan lingkungan berbasis kearifan lokal (seperti Sasi) yang

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

dikawal langsung oleh Kewang jauh lebih efektif, dan diyakini mampu menekan laju kerusakan hutan hingga 40% dibandingkan model pengawasan konvensional dari pemerintah (Ruhulessin, 2017). Di samping itu, penyelesaian sengketa hak pemanfaatan sumber daya alam melalui mediasi kelembagaan adat (Alternative Dispute Resolution) terbukti lebih menjamin kesepakatan yang damai (win-win solution) dan hemat biaya dibandingkan melalui jalur litigasi peradilan formal (Pariama, 2025). Pelibatan aktif Kewang yang telah dibekali pengetahuan identifikasi lingkungan juga terbukti meningkatkan kecepatan respons mitigasi terhadap ancaman kekeringan mata air dan erosi lahan (Luhukay et al., 2026). Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa intervensi berupa pelatihan mediasi dan pengawasan bagi Kewang merupakan bentuk pelayanan masyarakat yang sangat komprehensif, tepat sasaran, serta didukung oleh literatur ilmiah yang handal (Tjoa & Iskar, 2021).

Berdasarkan analisis situasi dan kehandalan pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas praktis operasional Kewang dalam mengawasi kelestarian lahan sagu, serta memperkuat keterampilan mereka dalam mendampingi mediasi konflik lahan di tingkat desa (Isyanawulan et al, 2023; Palampanga et al., 2026). Secara institusional, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun komitmen yang bersinergi antara Kewang, Pemerintah Negeri, dan masyarakat luas dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang harmonis (Sugianto et al., 2025; Febriani & Sarjan, 2026).

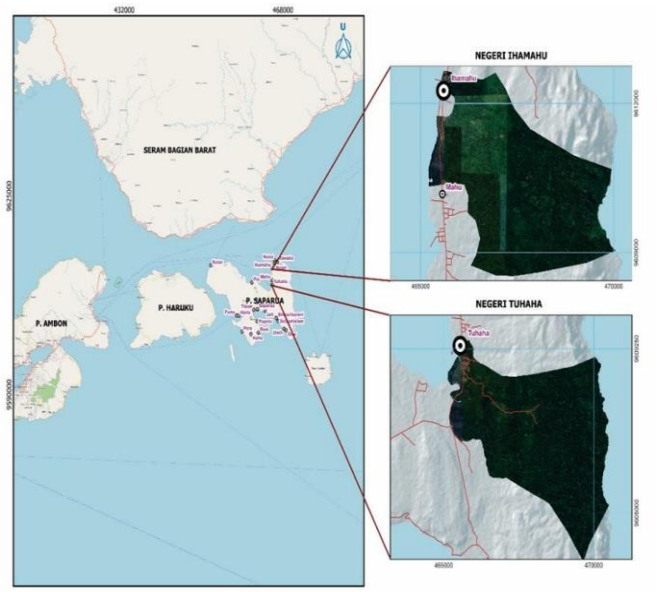
Manfaat langsung yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan respons Kewang dalam mengenali masalah ekologis di lapangan secara akurat dan menengahi sengketa tanpa memicu ketegangan horizontal (Tsurayya et al., 2024; Putra et al, 2025). Sementara itu, manfaat jangka panjangnya adalah terjaminnya perlindungan hasil kegiatan rehabilitasi sagu secara permanen dan menguatnya kohesi sosial masyarakat Negeri Ihamahu dalam menyongsong ketahanan pangan yang mandiri (Lombok et al., 2024).

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan penguatan peran Kewang ini diselenggarakan selama dua hari berturut-turut, yakni pada tanggal 27 hingga 28 Agustus 2026. Adapun lokasi kegiatan dipusatkan di Kantor Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Peta lokasi pelaksanaan kegiatan dapat dilihat secara lebih jelas pada Gambar 1.

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195



Gambar 1. Lokasi Penguatan Kewang dalam pengelolaan sagu
(Sumber : Laporan Walang Perempuan-Kehati, 2026)

2. Bahan dan Alat

Alat dan bahan yang digunakan yaitu Kertas plano atau karton, Spidol, Formulir pengamatan lapangan, Kamera/telepon genggam, Peta sederhana negeri, Lakban dan alat tulis.

3. Khalayak Sasaran

Mitra strategis yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan pelatihan ini adalah kelembagaan adat Kewang di Negeri Ihamahu yang beranggotakan 56 orang. Dari populasi tersebut, peserta kegiatan dibatasi sebanyak 15 orang (26,8% dari seluruh anggota) yang dipilih secara *purposive*, yaitu pemilihan yang disengaja berdasarkan kriteria tertentu dan bukan pemilihan acak (Palinkas et al., 2015). Pendekatan ini dipilih karena tujuan kegiatan bukan untuk menaksir kondisi seluruh anggota Kewang, melainkan membentuk kelompok inti yang kelak berperan sebagai pelatih bagi anggota lainnya (*Training of Trainers*/ToT).

Dasar pemilihan peserta mencakup lima kriteria. *Pertama*, peserta berstatus anggota aktif Kewang yang terlibat langsung dalam pengawasan hutan dan dusung sagu. *Kedua*, peserta mewakili unsur kepemimpinan, yaitu Ketua Kewang dan pengurus, sehingga hasil pelatihan memperoleh legitimasi adat ketika diteruskan kepada anggota lain. *Ketiga*, peserta mewakili keragaman pengalaman dan kelompok umur, sehingga pengetahuan ekologis anggota senior dapat dipadukan dengan kemampuan mencatat dan mendokumentasikan anggota yang lebih muda. *Kelima*, peserta bersedia mengikuti pelatihan dua hari penuh dan meneruskan hasilnya kepada anggota lain, yang dikonfirmasi melalui koordinasi dengan Pemerintah Negeri dan pengurus Kewang pada tahap persiapan.

Komposisi 15 peserta terdiri atas Ketua Kewang, 2 orang pengurus, dan 12 orang anggota yang berasal dari wilayah pengawasan yang berbeda. Keterwakilan yang dimaksud adalah

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

keterwakilan fungsional dan wilayah, bukan keterwakilan statistik. Konsekuensinya, hasil evaluasi dalam artikel ini menggambarkan perubahan pada kelompok inti pelatih dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi kepada seluruh 56 anggota. Perubahan pada 41 anggota lainnya bergantung pada keberhasilan mekanisme transfer pengetahuan yang diuraikan pada subbab berikutnya.

4. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini bersifat partisipatif dan aplikatif. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahapan persiapan berupa koordinasi teknis bersama Pemerintah Negeri dan pengurus Kewang setempat. Pada tahap pelaksanaan, penyampaian materi tidak hanya menggunakan metode ceramah interaktif, tetapi dikombinasikan dengan berbagai metode andragogi (pembelajaran orang dewasa) agar lebih efektif. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada penguatan peran Kewang serta teknik deteksi kerusakan ekosistem, di mana peserta diajak menggunakan metode diskusi gambar (permainan detektif hutan) dan praktik pengamatan langsung (observasi lapangan) untuk mencatat temuan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, pada hari kedua, metode difokuskan pada resolusi sengketa melalui metode demonstrasi, simulasi (*role-play*) penanganan konflik lahan (kebun/hutan sagu), dan diakhiri dengan metode kerja kelompok untuk merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Secara rinci tahapan kegiatan pelatihan penguatan peran dan tanggung jawab Kewang meliputi:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Negeri dan Kewang.
2. Penyampaian materi mengenai peran dan tanggung jawab Kewang.
3. Penyampaian materi mengenai perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam.
4. Penyampaian materi mengenai identifikasi kerusakan hutan atau lahan sagu.
5. Penyampaian materi mengenai mediasi konflik lahan sagu.
6. Diskusi dan berbagi pengalaman mengenai persoalan yang dihadapi Kewang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
7. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan Kewang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan sumber daya alam.
8. Penyusunan rencana tindak lanjut.
9. Dokumentasi kegiatan.

5. *Training of Trainers* (ToT) dan Mekanisme Transfer Pengetahuan

Training of Trainers merupakan pendekatan pelatihan berjenjang (*cascade*) yang membekali sekelompok kecil orang dengan pengetahuan dan keterampilan sekaligus kemampuan untuk meneruskannya kepada kelompok yang lebih besar. Pendekatan ini sesuai ketika populasi sasaran cukup besar sementara waktu dan sumber daya pelatihan terbatas. Landasan konseptualnya adalah teori difusi inovasi, yang menempatkan jejaring sosial dan tokoh yang dipercaya sebagai saluran utama penyebaran praktik baru (Rogers, 2003), serta prinsip pembelajaran orang dewasa yang menekankan pemanfaatan pengalaman dan relevansi masalah nyata (Knowles et al., 2015). Dalam kegiatan ini, 15 peserta berperan sebagai pelatih inti bagi 41 anggota Kewang lainnya, sehingga

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

setiap peserta diproyeksikan mendampingi sekitar dua hingga tiga anggota (41 : 15 ≈ 2,7).

Mekanisme transfer pengetahuan dirancang dalam empat tahap (Tabel 1). Pembekalan inti dilakukan selama dua hari pelatihan dengan alat yang sengaja dibuat sederhana dan dapat ditiru, yaitu kertas plano, kartu, format catatan lapangan, dan skenario kasus, sehingga peserta dapat mengulanginya tanpa peralatan khusus. Rencana Tindak Lanjut (RTL) kemudian dipakai sebagai instrumen pelembagaan: selain jadwal patroli, lokasi, petugas, dan sistem pelaporan, RTL memuat pembagian peserta sebagai pendamping bagi anggota lain. Penerusan dilakukan melalui pertemuan rutin Kewang, pendampingan langsung saat patroli, dan simulasi mediasi singkat, dan hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Ketua Kewang serta Pemerintah Negeri (Raja dan Saniri). Tahap terakhir adalah pemantauan oleh tim pelaksana dari Universitas Pattimura untuk memastikan penerusan berjalan dan mutu pesannya terjaga.

Tabel 1. Tahapan mekanisme transfer pengetahuan dari 15 peserta kepada 41 anggota Kewang

Tahap	Pelaku	Aktivitas	Luaran
1. Pembekalan inti	Tim pelaksana (fasilitator) dan 15 peserta	Pelatihan dua hari: ceramah interaktif, permainan, observasi lapangan, dan *role-play*; *pre-test* dan *post-test*	Peserta memahami materi dan mampu mempraktikkan pencatatan lapangan serta tahapan mediasi
2. Perencanaan penerusan	15 peserta dalam kerja kelompok	Penyusunan RTL: jadwal patroli, lokasi, petugas, sistem pelaporan, dan pembagian pendampingan anggota	Dokumen RTL yang disepakati bersama
3. Penerusan kepada 41 anggota	15 peserta sebagai pelatih inti; 41 anggota Kewang lainnya	Berbagi materi pada pertemuan rutin Kewang; pendampingan pengisian catatan lapangan saat patroli; simulasi mediasi singkat dengan kasus lokal	Anggota lain memahami peran, mampu mencatat temuan, dan mengenal tahapan mediasi
4. Pemantauan dan umpan balik	Tim pelaksana, Ketua Kewang, Pemerintah Negeri	Pendampingan berkala; telaah laporan patroli dan catatan mediasi; evaluasi ulang pengetahuan anggota	Perbaikan materi dan penguatan RTL

Catatan: evaluasi dalam artikel ini mencakup Tahap 1 dan Tahap 2. Tahap 3 dan Tahap 4 merupakan tindak lanjut.

6. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur berdasarkan luaran pengetahuan dan keterampilan praktis peserta. Indikator utamanya meliputi: (a) adanya peningkatan pemahaman konseptual peserta secara signifikan mengenai tugas dan fungsi Kewang dalam menjaga hutan dan tanah adat; (b) kemampuan peserta dalam mengoperasikan format catatan lapangan untuk mengidentifikasi kerusakan ekosistem; (c) kemampuan peserta dalam memperagakan tahapan dasar mediasi (sikap netral, komunikasi positif, analisis masalah) pada konflik tenurial lahan sagu; serta (d) tersusunnya sebuah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat jadwal pengawasan hutan, lokasi sasaran, petugas, dan sistem pelaporan yang hierarkis.

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

7. Metode Evaluasi

Evaluasi dirancang komprehensif pada ranah kognitif dan psikomotorik untuk mengukur ketercapaian indikator keberhasilan. Pengetahuan peserta diukur melalui *pre-test* dan *post-test*, sedangkan keterampilan diukur melalui observasi langsung menggunakan rubrik penilaian. Keaktifan dan partisipasi peserta dalam diskusi dicatat fasilitator sebagai data pendukung kualitatif.

Perhitungan persentase hasil pre-test dan post-test

Instrumen *pre-test* dan *post-test* terdiri atas 10 butir pilihan ganda berbasis studi kasus lapangan, diberikan pada awal hari pertama dan akhir hari kedua dengan butir yang sama. Butir dikelompokkan ke dalam empat indikator, yaitu pemahaman peran dan tanggung jawab (termasuk tugas adat dan aturan sasi), identifikasi kerusakan hutan dan lahan, keterampilan mediasi konflik, serta prosedur pelaporan dan RTL (termasuk prosedur patroli). Jawaban benar diberi skor 1, sedangkan jawaban salah atau kosong diberi skor 0. Persentase dihitung dengan rumus berikut.

(1) Skor indikator peserta (%) = (jawaban benar ÷ jumlah butir indikator) × 100

(2) Rerata indikator (%) = jumlah skor indikator seluruh peserta ÷ jumlah peserta (n = 15)

(3) Peningkatan (poin persentase) = rerata *post-test* − rerata *pre-test*

(4) *N-gain* (g) = (rerata *post-test* − rerata *pre-test*) ÷ (100 − rerata *pre-test*)

Angka pada kolom “Peningkatan” dinyatakan dalam poin persentase, yaitu selisih antara rerata *post-test* dan *pre-test*, sehingga bukan persentase kenaikan relatif terhadap nilai awal. Karena selisih yang sama bermakna berbeda pada nilai awal yang berbeda, peningkatan juga dinormalisasi dengan *N-gain* yang menunjukkan proporsi dari peningkatan maksimum yang dapat dicapai. Nilai g dikategorikan tinggi ($g \geq 0{,}70$), sedang ($0{,}30 \leq g < 0{,}70$), dan rendah ($g < 0{,}30$) (Hake, 1998). Pada *pre-test* dan *post-test*, indikator mediasi dan pelaporan mengukur pemahaman prosedur, sedangkan kemampuan praktiknya dinilai terpisah melalui rubrik.

Rubrik penilaian keterampilan

Keterampilan pengamatan lapangan dan mediasi dinilai dengan rubrik analitik berskala 1–4 (1 = belum tampak, 2 = mulai tampak, 3 = tampak, 4 = sangat baik). Setiap aspek memiliki deskriptor yang tegas agar penilaian konsisten antarpenilai (Tabel 2 dan Tabel 3). Rubrik pengamatan lapangan diterapkan pada hasil kerja kelompok saat praktik lapangan dan presentasi, sedangkan rubrik mediasi diterapkan pada peserta yang memerankan Kewang sebagai mediator dalam *role-play*. Penilaian dilakukan oleh fasilitator dan pengamat; bila penilai lebih dari satu, skor akhir adalah rerata skor para penilai.

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

Tabel 2. Rubrik penilaian keterampilan pengamatan lapangan (skor maksimum 16)

Aspek yang dinilai	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (tampak)	Skor 2 (mulai tampak)	Skor 1 (belum tampak)
1. Ketepatan identifikasi tanda kerusakan	Seluruh tanda kerusakan pada lokasi (misalnya erosi, penebangan, kerusakan pohon sagu, gangguan mata air) teridentifikasi benar tanpa bantuan fasilitator	Sebagian besar tanda kerusakan teridentifikasi benar; satu atau dua tanda terlewat	Hanya sebagian kecil tanda teridentifikasi, atau ada jenis kerusakan yang keliru; memerlukan arahan fasilitator	Tanda kerusakan tidak teridentifikasi, atau kondisi rusak dan normal tidak dapat dibedakan
2. Kelengkapan pencatatan pada format	Kolom lokasi, temuan, dugaan penyebab, dan tindakan awal terisi lengkap dan spesifik; lokasi dan waktu pengamatan dapat ditelusuri kembali	Keempat kolom terisi, tetapi sebagian uraian kurang spesifik	Dua atau tiga kolom terisi, atau uraian terlalu umum sehingga sulit ditelusuri	Hanya satu kolom terisi atau catatan tidak dapat digunakan
3. Ketepatan dugaan penyebab dan tindakan awal	Dugaan penyebab logis dan didukung bukti lapangan (misalnya kaitan penebangan di hulu, erosi, dan mata air); tindakan awal sesuai kewenangan Kewang dan aturan adat/sasi	Dugaan penyebab masuk akal dan tindakan awal sesuai, tetapi hubungan sebab-akibat belum dijelaskan	Dugaan penyebab dangkal atau tidak sesuai bukti, atau tindakan awal di luar kewenangan Kewang	Tidak mengajukan dugaan penyebab maupun tindakan awal
4. Dokumentasi dan penyampaian hasil	Dokumentasi visual jelas dan terkait temuan; presentasi runtut, seluruh anggota kelompok berperan, dan pertanyaan dijawab dengan baik	Dokumentasi ada dan relevan; presentasi cukup runtut	Dokumentasi kurang jelas atau kurang relevan; presentasi tidak runtut atau bertumpu pada satu orang	Tidak ada dokumentasi dan hasil tidak dapat disampaikan

Tabel 3. Rubrik penilaian keterampilan mediasi konflik (skor maksimum 20)

Aspek yang dinilai	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (tampak)	Skor 2 (mulai tampak)	Skor 1 (belum tampak)
1. Penggalian fakta (Mata Kewang)	Pokok sengketa, kronologi, dan objek yang disengketakan (batas atau hak pemanfaatan) digali lengkap dan objektif dengan bertanya kepada kedua pihak dan saksi	Pokok sengketa dan sebagian kronologi teridentifikasi secara objektif	Fakta tidak lengkap atau mulai bercampur dengan opini	Fakta tidak digali atau hanya memuat versi satu pihak

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

Aspek yang dinilai	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (tampak)	Skor 2 (mulai tampak)	Skor 1 (belum tampak)
2. Netralitas dan mendengar aktif (Telinga Kewang)	Memberi kesempatan setara, tidak menyela, merangkum ulang pernyataan, dan tidak menunjukkan keberpihakan secara verbal maupun nonverbal	Kesempatan bicara setara, tetapi sesekali menyela atau jarang merangkum	Kesempatan bicara tidak seimbang atau mulai tampak kecenderungan memihak	Jelas memihak atau menghakimi salah satu pihak
3. Analisis masalah dan pemetaan pihak (Kepala Kewang)	Seluruh pihak terlibat dan terdampak (termasuk tokoh adat dan saksi) teridentifikasi, serta posisi dan kepentingan kedua pihak dibedakan dengan tepat	Pihak terkait teridentifikasi dan sebagian kepentingan dipahami	Analisis hanya sampai pada posisi masing-masing pihak	Masalah dan pihak terkait tidak dianalisis
4. Komunikasi positif dan de-eskalasi (Suara Kewang)	Menggunakan kalimat positif yang tidak menyalahkan, menurunkan emosi para pihak, dengan bahasa santun yang sesuai adat	Sebagian besar kalimat positif; sesekali bernada menyalahkan	Komunikasi datar dan kurang mampu meredakan ketegangan	Komunikasi memperkeruh suasana
5. Perumusan penyelesaian damai (Jalan Damai)	Mendorong para pihak merumuskan opsi sendiri, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan melalui musyawarah, dan menetapkan tindak lanjut (misalnya verifikasi batas atau pencatatan kesepakatan)	Opsi dan kesepakatan dirumuskan, tetapi tindak lanjut belum jelas	Solusi ditawarkan mediator tanpa melibatkan para pihak	Tidak ada penyelesaian yang dirumuskan

Nilai keterampilan dihitung dengan rumus Nilai (%) = (jumlah skor diperoleh ÷ skor maksimum) × 100. Skor maksimum adalah 16 untuk rubrik pengamatan lapangan (4 aspek) dan 20 untuk rubrik mediasi (5 aspek). Nilai diinterpretasikan sebagai sangat baik (85–100%), baik (70–84%), cukup (55–69%), dan perlu pendampingan (< 55%). Peserta dinyatakan mencapai indikator keberhasilan keterampilan bila memperoleh nilai minimal 70% (kategori baik).

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan proses pelaksanaan kegiatan, temuan utama, perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta, serta analisis hasil berdasarkan kerangka teori yang melandasi kegiatan.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan diikuti 15 peserta selama dua hari dan disusun mengikuti urutan belajar dari pengalaman: peserta lebih dahulu mengalami (permainan, praktik lapangan, simulasi), kemudian merefleksikan, dan baru kemudian menerima penguatan konsep dari fasilitator. Susunan acara hari pertama disajikan pada Tabel 4 dan hari kedua pada Tabel 5.

Hari pertama: penguatan peran dan identifikasi kerusakan hutan

Tabel 4. Susunan acara hari pertama: penguatan peran Kewang dan identifikasi kerusakan hutan

Waktu	Kegiatan	Metode
08.30–09.00	Registrasi peserta	Administrasi
09.00–09.30	Pembukaan, perkenalan peserta, dan *pre-test*	Diskusi singkat
09.30–10.30	Sesi 1. Peran dan tanggung jawab Kewang dalam menjaga hutan dan tanah adat	Ceramah interaktif dan permainan "Pohon Peran Kewang"
10.30–10.45	Istirahat	–
10.45–12.00	Sesi 2. Tanda-tanda kerusakan hutan (penebangan liar, kebakaran, erosi, kerusakan sagu, mata air terganggu)	Diskusi gambar dan pengalaman peserta (permainan "Detektif Hutan")
12.00–13.00	Istirahat makan siang	–
13.00–15.00	Sesi 3. Praktik lapangan: mengamati kondisi hutan/kebun dan mencatat temuan	Observasi lapangan
15.00–16.00	Presentasi hasil pengamatan kelompok	Presentasi dan diskusi
16.00–16.15	Refleksi hari pertama	Lingkar refleksi

Setelah registrasi, pembukaan, dan *pre-test*, kegiatan dimulai dengan permainan "Pohon Peran Kewang". Fasilitator menyiapkan gambar pohon besar pada kertas plano dan menjelaskan bahwa akar melambangkan nilai adat, batang melambangkan tugas utama, dan daun melambangkan tindakan nyata Kewang. Peserta menuliskan tugas mereka pada kertas kecil lalu menempelkannya pada bagian pohon yang sesuai (Gambar 2).

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195



Gambar 2. Permainan "Pohon Peran Kewang"

Sesi berikutnya membahas tanda-tanda kerusakan hutan melalui permainan "Detektif Hutan". Kelompok mencari "petunjuk kerusakan" pada foto atau gambar kondisi hutan, kemudian menjelaskan jenis kerusakan dan kemungkinan penyebabnya. Pada praktik lapangan, kelompok yang sama menerima format catatan lapangan dengan empat kolom (lokasi, temuan, dugaan penyebab, dan tindakan awal) dan mengidentifikasi kerusakan di hutan, sungai, dan pantai Negeri Ihamahu. Hasilnya dipresentasikan dan diperkuat oleh fasilitator (Gambar 3). Hari pertama ditutup dengan lingkar refleksi.



Gambar 3. Peserta melakukan praktik identifikasi kerusakan hutan

Hari kedua: mediasi konflik lahan dan rencana tindak lanjut

Hari kedua diawali dengan tinjauan hari pertama. Selanjutnya dua kelompok mendiskusikan jenis dan penyebab konflik lahan menggunakan kasus simulasi, yaitu dua keluarga yang berselisih karena tanda batas kebun sagu hilang setelah hujan deras, dan setiap kelompok mempresentasikan cara penyelesaian yang mereka tawarkan.

Tabel 5. Susunan acara hari kedua: mediasi konflik lahan dan rencana tindak lanjut

Waktu	Kegiatan	Metode
08.30–09.00	Sesi 4. Tinjauan hari pertama	Tanya jawab
09.00–10.30	Sesi 5. Jenis konflik lahan di negeri dan penyebabnya	Diskusi kelompok
10.30–10.45	Istirahat	–

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

Waktu	Kegiatan	Metode
10.45–12.00	Sesi 6. Langkah dasar mediasi konflik lahan	Ceramah singkat dan demonstrasi (permainan "Misi Kewang")
12.00–13.00	Istirahat makan siang	–
13.00–14.30	Sesi 7. Simulasi mediasi konflik batas kebun/hutan	*Role-play*
14.30–15.30	Penyusunan rencana pengawasan hutan dan penanganan konflik	Kerja kelompok
15.30–16.00	*Post-test*, evaluasi, dan penutupan	Tes singkat dan komitmen bersama

Langkah dasar mediasi diperkenalkan melalui demonstrasi dan permainan "Misi Kewang – Selamatkan Petuanan". Kelompok diminta mencegah konflik batas lahan di sekitar hutan sagu berkembang menjadi pertengkaran antarwarga dengan melewati lima pos: Mata Kewang (apa yang terjadi), Telinga Kewang (siapa yang terlibat), Kepala Kewang (apa yang harus dilakukan Kewang), Suara Kewang (kalimat positif yang disampaikan), dan Jalan Damai (cara penyelesaian yang damai).

Peserta kemudian memainkan peran (*role-play*) pada dua kasus. Pada kasus pertama, Keluarga A menyatakan batas kebunnya adalah pohon kenari tua di dekat sungai, sedangkan Keluarga B menyatakan batas sebenarnya sekitar 10 meter ke arah sungai; konflik memanas ketika Keluarga A membersihkan lahan hingga mendekati batas yang diklaimnya. Pada kasus kedua, Keluarga A mengklaim kawasan hutan sagu sebagai wilayah kelola turun-temurun, sementara Keluarga B menebang pohon sagu di lokasi yang sama karena menganggapnya bagian petuanan yang dapat dimanfaatkan bersama. Peran yang dimainkan adalah Keluarga A, Keluarga B, Kewang sebagai mediator, tokoh adat atau saksi, dan pengamat (Gambar 4). Kegiatan ditutup dengan kerja kelompok menyusun RTL pengawasan hutan dan penanganan konflik, *post-test*, serta komitmen bersama.



Gambar 4. Peserta melakukan simulasi mediasi konflik

Temuan Utama

Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan pada keempat indikator (Tabel 6). Rerata keempat indikator naik dari 52,5% menjadi 90,0%, atau meningkat 37,5 poin persentase dengan *N-gain* 0,79 (kategori tinggi). Seluruh indikator berada pada kategori *N-gain* tinggi (0,73–0,88).

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

Tabel 6. Hasil evaluasi pengetahuan Kewang (*pre-test* dan *post-test*, *n* = 15)

Indikator penilaian	**Rerata *pre-test* (%)**	**Rerata *post-test* (%)**	**Peningkatan (poin persentase)**	***N-gain* (*g*)**	**Kategori**
Pemahaman peran dan tanggung jawab	60	95	35	0,88	Tinggi
Identifikasi kerusakan hutan dan lahan	55	90	35	0,78	Tinggi
Keterampilan mediasi konflik	45	85	40	0,73	Tinggi
Prosedur pelaporan dan RTL	50	90	40	0,80	Tinggi
Rerata keempat indikator	**52,5**	**90,0**	**37,5**	**0,79**	**Tinggi**

Sumber: data primer, diolah. Peningkatan = rerata *post-test* − rerata *pre-test*; *N-gain* = peningkatan ÷ (100 − rerata *pre-test*). Baris rerata adalah rerata sederhana keempat indikator.

Terdapat empat temuan utama. *Pertama*, peningkatan absolut terbesar terjadi pada keterampilan mediasi dan prosedur pelaporan (masing-masing 40 poin), dua indikator dengan nilai awal terendah (45% dan 50%). Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas peserta terletak pada kemampuan prosedural, bukan pada pemahaman norma adat yang sudah relatif kuat sejak awal (60%). *Kedua*, nilai akhir tertinggi dicapai pada pemahaman peran dan tanggung jawab (95%), sedangkan mediasi tetap menjadi indikator dengan nilai akhir terendah (85%) dan *N-gain* terendah (0,73). *Ketiga*, pelatihan menghasilkan luaran praktis berupa catatan lapangan yang diisi dan dipresentasikan setiap kelompok serta simulasi mediasi pada dua kasus dengan lima peran. *Keempat*, peserta menyusun RTL yang memuat jadwal patroli, lokasi yang diawasi, petugas, dan sistem pelaporan berjenjang kepada Pemerintah Negeri (Raja dan Saniri).

Perubahan Pengetahuan, Keterampilan, dan Perilaku Peserta

Perubahan pada peserta dibaca pada tiga tingkat, mengacu pada model evaluasi pelatihan berjenjang (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006): pembelajaran (pengetahuan dan keterampilan), perilaku, dan hasil bagi lembaga.

Perubahan pengetahuan. Rerata nilai naik dari 52,5% menjadi 90,0%. Nilai awal peran sebesar 60% menunjukkan bahwa peserta sudah mengenal tugas adat Kewang, tetapi pemahaman tersebut belum tersusun sebagai rangkaian nilai, tugas, dan tindakan. Permainan Pohon Peran Kewang mengubah pengetahuan yang semula implisit menjadi tugas-tugas yang dituliskan, dibahas, dan disepakati bersama, dan perubahan inilah yang tercermin pada nilai akhir 95%.

Perubahan keterampilan. Pada pengamatan lapangan, peserta beralih dari pengamatan informal ke pencatatan terstruktur dengan empat kolom yang menuntut lokasi, temuan, dugaan penyebab, dan tindakan awal. Pada mediasi, keterampilan manajerial yang pada analisis situasi tergolong terbatas mulai dipandu oleh urutan lima pos yang dapat dilatih dan dinilai. Karena keterampilan ini diamati melalui praktik lapangan dan *role-play*, bukti perubahannya tidak hanya berupa skor tes, tetapi juga kinerja yang dapat dilihat dan dinilai dengan rubrik.

Perubahan perilaku dan kelembagaan. Perubahan perilaku yang dapat ditunjukkan pada tahap ini baru berupa komitmen dan perencanaan, yaitu RTL yang memuat jadwal patroli, petugas,

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

dan jalur pelaporan, serta komitmen bersama pada penutupan kegiatan. Perubahan perilaku yang sesungguhnya, misalnya patroli yang berjalan sesuai jadwal, laporan yang diterima Pemerintah Negeri, dan kasus nyata yang dimediasi dengan lima pos, belum diamati dalam kegiatan ini dan perlu dipantau pada tahap tindak lanjut. Demikian pula, perubahan pada 41 anggota lain bergantung pada keberhasilan transfer pengetahuan yang dirancang melalui ToT (Tabel 1).

Analisis Hasil Berdasarkan Teori

Hasil kegiatan dianalisis dengan lima kerangka teori yang melandasi rancangan pelatihan, yaitu CBNRM, SES, LEK, *Experiential Learning*, dan ADR. Setiap kerangka dikaitkan dengan indikator hasil yang paling relevan melalui dua pertanyaan: mekanisme apa dalam pelatihan yang menjelaskan perubahan nilai, dan di mana batas penjelasan tersebut.

CBNRM: kelembagaan adat yang sah, tetapi belum dilengkapi kapasitas operasional

CBNRM berangkat dari asumsi bahwa sumber daya lebih lestari bila wewenang dan tanggung jawab pengelolaan berada pada institusi lokal yang memiliki legitimasi sosial (Berkes, 2004). Kewang memenuhi syarat itu, karena sanksi sasi dihormati dan Kewang dikenal sebagai penjaga petuanan (Harkes & Novaczek, 2002; Ruhulessin, 2017). Nilai awal 60% pada indikator peran memperlihatkan bahwa kelemahan peserta bukan pada pengetahuan normatif, melainkan pada belum tersusunnya norma itu menjadi tugas yang dapat dioperasikan. Pohon Peran Kewang menjembatani hal ini dengan menghubungkan nilai adat (akar), tugas utama (batang), dan tindakan nyata (daun). *N-gain* tertinggi pada indikator ini (0,88) masuk akal karena pelatihan hanya perlu menata pengetahuan yang sudah dimiliki, bukan mengajarkan pengetahuan baru.

Pola hasil juga sejalan dengan prinsip rancangan institusi pengelolaan sumber daya bersama yang tangguh (Ostrom, 1990). Keempat indikator hasil berpadanan dengan prinsip aturan dan batas yang jelas (peran dan tanggung jawab), pemantauan oleh pihak yang akuntabel kepada pengguna (identifikasi kerusakan), mekanisme penyelesaian konflik berbiaya rendah (mediasi), dan keterhubungan berjenjang dengan tingkat pemerintahan di atasnya (pelaporan kepada Raja dan Saniri). Dengan demikian, pelatihan tidak menambahkan aturan baru, melainkan melengkapi komponen operasional institusi yang sudah ada. Pelaporan berjenjang dalam RTL membangun hubungan vertikal antara Kewang dan Pemerintah Negeri, yang menurut Berkes (2009) menjadi inti ko-manajemen adaptif. Namun, kekuatan hubungan ini bergantung pada kepatuhan terhadap RTL dan dukungan regulasi negeri, sehingga pelibatan Saniri yang disarankan pada simpulan merupakan syarat keberlanjutan, bukan sekadar tambahan.

SES dan LEK: dari pengetahuan tacit menuju pemantauan yang dapat dilaporkan

Dalam kerangka SES (Ostrom, 2009), hutan sagu, sungai, pantai, dan mata air merupakan komponen sistem sumber daya, sedangkan Kewang, sasi, dan Saniri adalah sistem tata kelola yang mengaturnya. Kerusakan pada satu komponen merambat ke komponen lain, misalnya penebangan di hulu yang memicu erosi dan mengganggu mata air. Kolom “dugaan penyebab” pada format catatan lapangan mendorong peserta menelusuri hubungan lintas komponen tersebut dan tidak

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

berhenti pada gejala. Peningkatan indikator identifikasi kerusakan dari 55% menjadi 90% (*N-gain* 0,78) dapat dijelaskan oleh pergeseran ini, yaitu dari mengenali jenis kerusakan ke menalar penyebabnya, meskipun data dalam kegiatan ini belum cukup untuk memisahkan kontribusi pencatatan dari kontribusi diskusi gambar.

Dari sisi LEK, nilai awal 55% menunjukkan peserta sudah memiliki pengetahuan ekologis yang substansial karena hidup berdampingan dengan hutan, tetapi pengetahuan semacam ini cenderung bersifat *tacit*, tersebar pada individu, dan diwariskan secara lisan (Berkes et al., 2000). Pelatihan tidak mengajarkan ekologi dari nol. Diskusi gambar dan format catatan lapangan menyediakan wadah untuk memunculkan pengetahuan itu, menyamakannya antarpeserta, lalu mengubahnya menjadi kategori yang lazim dalam penilaian lingkungan, yaitu lokasi, temuan, penyebab, dan tindakan. Inilah makna integrasi hukum adat dengan pengawasan modern pada simpulan: LEK tidak digantikan, tetapi dikodifikasi sehingga dapat dilaporkan dan dibandingkan dari waktu ke waktu. Pemantauan partisipatif oleh masyarakat lokal dapat menghasilkan data yang berguna bagi keputusan pengelolaan dan menumbuhkan rasa memiliki (Danielsen et al., 2009). Batasnya, ketepatan identifikasi peserta belum divalidasi terhadap pengukuran ekologis independen, misalnya inventarisasi tegakan sagu, sehingga RTL sebaiknya memuat verifikasi berkala oleh tim peneliti.

Experiential Learning: mengapa mediasi paling sulit dikuasai

Rancangan dua hari mengikuti siklus belajar Kolb (1984). Pengalaman konkret diwujudkan dalam praktik lapangan dan *role-play*; observasi reflektif dalam presentasi kelompok, lingkar refleksi, dan peran pengamat pada simulasi; konseptualisasi abstrak dalam ceramah singkat, demonstrasi, dan kerangka lima pos; serta eksperimentasi aktif dalam *role-play* kasus kedua dan penyusunan RTL. Karena peserta adalah orang dewasa dengan pengalaman luas, penggunaan kasus lokal (batas kebun, hak pemanfaatan sagu) meningkatkan relevansi belajar (Knowles et al., 2015) dan kemungkinan ikut menjelaskan besarnya kenaikan nilai pada seluruh indikator.

Pola *N-gain* menunjukkan batas pendekatan ini. Mediasi dan pelaporan naik paling besar secara absolut (40 poin), tetapi mediasi memiliki *N-gain* terendah (0,73) dan nilai akhir terendah (85%). Keterampilan interpersonal yang kompleks seperti mediasi memerlukan beberapa putaran praktik dengan umpan balik, sedangkan pelatihan hanya menyediakan satu sesi *role-play* berdurasi 90 menit untuk dua kasus. Satu putaran cukup untuk memahami urutan langkah, tetapi belum tentu untuk menguasainya. Rancangan ToT berpotensi menambah putaran tersebut, karena peserta yang mengajarkan kembali materi kepada anggota lain melalui pendampingan di lapangan menjalani tahap eksperimentasi aktif yang berulang. Hal ini masih perlu dibuktikan melalui pemantauan pada tahap tindak lanjut.

ADR: mempertajam musyawarah adat dengan disiplin prosedural

Lima pos Misi Kewang berpadanan dengan tahapan mediasi dan pendekatan penyelesaian berbasis kepentingan (Fisher et al., 1991; Moore, 2014), sebagaimana dirangkum pada Tabel 7.

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

Dalam konteks ini, ADR bukan prosedur asing yang dicangkokkan ke dalam masyarakat adat, melainkan penajaman praktik musyawarah yang sudah ada. Kontribusi pelatihan adalah disiplin prosedural yang sering tidak eksplisit dalam penyelesaian adat: memisahkan penggalian fakta dari penilaian, memetakan semua pihak yang terlibat dan terdampak, membedakan posisi dari kepentingan, serta mengelola bahasa agar tidak memicu eskalasi. Pendekatan ini dilaporkan lebih menjamin kesepakatan yang damai dan lebih murah dibandingkan jalur peradilan formal (Pariama, 2025).

Tabel 7. Keterkaitan lima pos Misi Kewang dengan tahapan mediasi dalam ADR

Pos	**Pertanyaan kunci**	**Fungsi dalam mediasi**	**Padanan konsep ADR**
Mata Kewang	Apa yang terjadi?	Menggali fakta dan kronologi sebelum menilai	Pengumpulan informasi (*fact-finding*)
Telinga Kewang	Siapa yang terlibat?	Mendengarkan semua pihak, menjaga netralitas, dan memetakan pihak terdampak	Pemetaan pihak (*stakeholder mapping*); mendengar aktif
Kepala Kewang	Apa yang harus dilakukan Kewang?	Menganalisis akar masalah dan membedakan posisi dari kepentingan	Penyelesaian berbasis kepentingan (*interest-based*)
Suara Kewang	Kalimat positif apa yang disampaikan?	Menurunkan emosi dan mencegah eskalasi	Komunikasi empatik; de-eskalasi
Jalan Damai	Cara damai apa yang dapat ditempuh?	Merumuskan opsi dan kesepakatan melalui musyawarah	Penyelesaian *win-win*; musyawarah mufakat

Dua kasus yang dimainkan mewakili dua tipe konflik yang menuntut strategi berbeda. Sengketa batas antara Keluarga A dan Keluarga B pada dasarnya adalah konflik data: kedua pihak mengacu pada penanda batas yang berbeda, sehingga penyelesaiannya bertumpu pada verifikasi bersama oleh saksi sejarah batas dan tokoh adat. Sengketa pemanfaatan hutan sagu adalah konflik hak. Schlager dan Ostrom (1992) membedakan bundel hak atas sumber daya menjadi akses, pemanfaatan, pengelolaan, eksklusi, dan pengalihan. Keluarga A mengklaim hak pengelolaan berdasarkan pewarisan, sedangkan Keluarga B mengklaim hak pemanfaatan atas petuanan bersama, sehingga keduanya sebenarnya berbicara tentang tingkatan hak yang berbeda. Mediator perlu lebih dahulu memperjelas hak yang diklaim sebelum merundingkan pembagian waktu atau lokasi pemanfaatan. Melatih peserta pada kedua tipe konflik ini memperluas kemampuan mereka melampaui sengketa batas, yang pada pendahuluan diidentifikasi sebagai sumber konflik (Sitania et al., 2020).

Satu hal yang sulit dalam penerapannya adalah posisi Kewang yang berlapis. Kewang adalah otoritas adat sekaligus anggota komunitas yang dapat terhubung dengan para pihak melalui kekerabatan, sehingga mudah bergeser dari mediator fasilitatif menjadi hakim adat yang memutuskan. Pos Telinga Kewang dirancang untuk menjaga netralitas, tetapi perilaku ini baru teruji dalam simulasi, bukan dalam sengketa nyata ketika kepentingan keluarga ikut bermain. Nilai akhir mediasi yang paling rendah di antara indikator lainnya konsisten dengan kesulitan tersebut. Selain itu, kesepakatan hasil mediasi adat perlu dicatat dan diketahui Pemerintah Negeri atau Saniri agar

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

memiliki dasar yang kuat bila sengketa muncul kembali.

Sintesis dan keterbatasan

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa kelima kerangka teori bekerja sebagai satu rangkaian: LEK dan nilai adat menjadi modal pengetahuan, SES menyediakan cara membaca masalah lintas komponen, pembelajaran berbasis pengalaman menjadi mekanisme perubahan, ADR menjadi jalur penyelesaian konflik, dan CBNRM menjadi wadah kelembagaan yang menampung semuanya melalui RTL dan ToT (Tabel 8). Temuan yang paling penting secara teoretis adalah bahwa kesenjangan kapasitas Kewang terletak pada kemampuan operasional, bukan pada legitimasi atau pengetahuan lokalnya. Karena itu, penguatan kelembagaan adat lebih tepat diarahkan pada pengoperasian dan pelembagaan pengetahuan yang sudah ada daripada penggantiannya dengan prosedur dari luar.

Tabel 8. Sintesis keterkaitan teori, aktivitas pelatihan, dan hasil kegiatan

Kerangka teori	Aktivitas pelatihan	Bukti hasil	Batas penjelasan
CBNRM	Pohon Peran Kewang; RTL dengan pelaporan berjenjang	Pemahaman peran 60% → 95% (g = 0,88); RTL tersusun	Keberlanjutan bergantung pada kepatuhan terhadap RTL dan dukungan regulasi negeri
SES	Detektif Hutan; format catatan lapangan dengan kolom dugaan penyebab	Identifikasi kerusakan 55% → 90% (g = 0,78)	Ketepatan identifikasi belum divalidasi dengan pengukuran ekologis independen
LEK	Diskusi gambar dan pengalaman peserta; praktik di hutan, sungai, dan pantai	Pengetahuan lokal dituangkan dalam catatan lapangan yang dipresentasikan	Indikator ekologis lokal belum didokumentasikan secara rinci
Experiential Learning	Siklus praktik, presentasi, refleksi, konseptualisasi, *role-play*, dan RTL	Mediasi 45% → 85% (g = 0,73); pelaporan 50% → 90% (g = 0,80)	Satu siklus belum cukup untuk menguasai keterampilan mediasi
ADR	Misi Kewang (lima pos); *role-play* dua kasus	Peserta memerankan tahapan mediasi pada dua tipe konflik	Efektivitas pada kasus nyata dan kekuatan mengikat kesepakatan belum teruji

Peserta berjumlah 15 orang dan dipilih secara *purposive*, tidak ada kelompok pembanding, dan data yang dianalisis berupa rerata kelompok tanpa uji statistik. *Post-test* dilakukan pada hari yang sama sehingga belum mengukur retensi. Transfer pengetahuan kepada 41 anggota lain, perubahan perilaku di lapangan, dan efektivitas mediasi pada kasus nyata belum dievaluasi. Kegiatan selanjutnya disarankan menambahkan *post-test* tertunda dua hingga tiga bulan, observasi pelaksanaan patroli dan pelaporan, uji nonparametrik berpasangan (misalnya Wilcoxon) bila skor per peserta tersedia, serta evaluasi pada anggota yang menerima pengetahuan melalui ToT.

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.176-195

SIMPULAN

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas anggota Kewang Negeri Ihamahu secara signifikan dalam menjaga kelestarian hutan sagu. Hal baru yang dihasilkan adalah terintegrasinya metode pengawasan lingkungan modern dengan hukum adat, serta terbentuknya Rencana Tindak Lanjut (RTL) patroli yang terstruktur. Kegiatan ini berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya model penyelesaian konflik (mediasi) berbasis kearifan lokal. Disarankan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya agar dilakukan pendampingan berkala terhadap implementasi RTL yang telah disusun, serta pelibatan langsung unsur Saniri Negeri untuk memperkuat regulasi desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Yayasan Walang Perempuan dan KEHATI yang telah merancang dan mendanai pelaksanaan kegiatan pengabdian pada Masyarakat. Terimakasih juga kami sampaikan Kepada Raja Negeri Ihamahu beserta para Kewang atas dukungannya untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Secara khusus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura atas pemberian surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berkes, F. 2004. Rethinking community-based conservation. *Conservation Biology, 18*(3), 621–630.

Berkes, F. 2009. Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management, 90*(5), 1692–1702.

Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. 2000. Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications, 10*(5), 1251–1262.

Danielsen, F., Burgess, N. D., Balmford, A., et al. 2009. Local participation in natural resource monitoring: A characterization of approaches. *Conservation Biology, 23*(1), 31–42.

Dayanto, 2024. Penguatan Kelembagaan Adat Kewang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Maluku. Jurnal Media Hukum. Vol.12 (1), Doi:10.59414/jmh.v12i1.655

Febriani N. Sarjan M. 2026. Revitalisasi Filosofi Ngaha Aina Ngoho: Rekonstruksi Prinsip Keseimbangan Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Dana Mbojo. Journal of Science Education and Environmental Literacy Global. Vol 2(1).

Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. 1991. *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (2nd ed.). Penguin Books.

Hake, R. R. 1998. Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, *66*(1), 64–74.

Harkes, I., & Novaczek, I. 2002. Presence, performance, and institutional resilience of sasi, a traditional management institution in Central Maluku, Indonesia. *Ocean & Coastal Management, 45*(4–5), 237–260.

Isyanawulan G., Y. Hendarso., Zulfikri Suleman., Muhammad Izzudin. 2023. Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan di Kabupaten Ogan Kemering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Vol 9(2). DOI**:** https://doi.org/10.23887/jiis.v9i2.66453

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. 2006. *Evaluating training programs: The four levels* (3rd ed.). Berrett-Koehler.

Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. 2015. *The adult learner* (8th ed.). Routledge.

Kolb, D. A. 1984. *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.

Luhukay M, A. Boreel, M.Tjoa, G.Mardiatmoko. 2026. The Importance of Sago Forest for Local Food Security and Climate Change Management on Small Island. Journal La Lifesci. VOL. 07 (02)(166-181), DOI:10.37899/journallalifesci.v7i2.3269

Lombok, AL., Budiman, L., & Suhendi, D. 2024. Resiliensi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, *1*(2), 63–71. Retrieved from https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/5113

Mongabay, 2021. Kearifan lokal Sasi dan peran Kewang dalam mewujudkan kelestarian lingkungan di Maluku. https://econusa.id/id/ecoblog/menyerap-spirit-kewang-untuk-maluku-berkelanjutan/

Moore, C. W. 2014. *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.

Ostrom, E. 1990. *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Ostrom, E. 2009. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, *325*(5939), 419–422.

Palampanga, A. Z., Ahnar A Saru, S. A. ., Makoya, N. V., Roy Yotomaruangi, A. V. ., Ansar, A., & Wiyono, J. 2026. Resolusi Konflik Agraria Berbasis Bukti melalui Mediasi dan Pemetaan Partisipatif . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *7*(2), 2858–2866. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v7i2.8920

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. 2015. Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, *42*(5), 533–544.

Ponisri, P., Farida, A., Hasa, M, F., Darma, D., Mangallo, B., Murtiningrum, M., Abu, N. 2023. Budidaya Sagu sebagai Pilar Utama Penghidupan Masyarakat Lokal di Kampung

Baingkete. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 253-261.

Pariama H. 2025. Manajemen Konflik Tenurial Masyarakat Adat Pada Kawasan Taman Nasional Manusela Dan Hutan Produksi Konversi (Studi Kasus Pada Dusun Usali Negeri Hatumete Maluku Tengah). Tesis (Tidak dipublikasikan). Universitas Pattimura Ambon.

Putra HTS., Muhamad RAT., Ridwan S, 2025. Dinamika Konflik Agraria dan Ketimpangan Tata Kelola:: Studi Kasus Sengketa Lahan di Desa Batu Mila. *Journal of Peace, Security and Democracy*, *1*(2), 49-73. https://doi.org/10.63280/jpsd.v1i2.45967

Rogers, E. M. 2003. *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Ruhulessin, H. 2017. "Peranan Korps Kewang Dalam Melestarikan Lingkungan Di Kepulauan Lease." Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.15(4).

Schlager, E., & Ostrom, E. 1992. Property-rights regimes and natural resources: A conceptual analysis. *Land Economics*, *68*(3), 249–262.

Sitania S, Kastanya A., Tjoa M., 2020. Konflik Tenurial Pada Hutan Lindung Gunung Sirimau Wilayah KPHL Unit XIVKota Ambon. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil. Vol 4(2). DOI**:** https://doi.org/10.30598/jhppk.v4i2.2982

Selanno, YS., Tjoa M. Puttileihalat MS. 2026, Kearifan Lokal Dan Resiliensi Sosio-Kultural Dalam Pengelolaan Hutan Sagu Berkelanjutan Di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Marsegu Jurnal Sains dan Teknologi. Vol 3(4). Doi: https://doi.org/10.69840/marsegu/3.4.2026.416-437

Sihombing, Y. 2023. Inovasi Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, *5*, 83–90. https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.707

Sugianto, Tarmudi, Ahmad Royhan Bustomi, Derrel Azhar Sugianto, & Fardan Zidane Juniawan. 2025. Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat Adat. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, *4*(1), 89–100. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1191

Tjoa M, Iskar., 2021. Efektifitas Kelembagaan Adat Dalam Pengelolaan Hutan (*Pembelajaran dari Pengelolaan Dusung di Maluku*) Bookchapter : Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Bingkai Budaya Kearifan Lokal di Maluku. Penerbit Kanisius Yogyakarta.

Tjoa M., Sahureka M., Renyaan A., 2021. The Role Of Customary Institutions In Natural Resource Management In Kailolo, Haruku Island. Tropical Small Island Agriculture Management. Vol 1(1). DOI**:** https://doi.org/10.30598/tsiam.2021.1.1.19

Tsurayya, A., Darnia, M., Mustafarsyach, M., & Utami, W. 2024. Analisa Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(11), 430-434. https://doi.org/10.5281/zenodo.12731220